

DINAMIKA LAYANAN PERPUSTAKAAN DI ERA DIGITALISASI
*DYNAMICS OF LIBRARY SERVICES IN THE ERA OF DIGITALIZATION***Sudirman¹, Fadilah Risqy Utami², Nadia Esa Putri³**¹Pustakawan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email: sudirmansos@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan perpustakaan sangat esensial dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan di bidang pendidikan. Perpustakaan sebagai sarana dan prasarana pelayanan kebutuhan literatur dan proses pembelajaran untuk mendukung proses pencerdasan kehidupan bangsa. Di Era digitalisasi saat ini, sebagai wujud kemajuan informasi dan teknologi telah memberikan kemudahan kepada pemustaka untuk mencari ilmu pengetahuan secara cepat. Kebutuhan akan sumber bacaan dan literatur dapat diperoleh dalam waktu sekejap tanpa meninggalkan tempat di ruang waktu yang sama. Dengan kemudahan aksesibilitas informasi, data, rekaman atau mungkin buku hasil karya manusia secara digital makin menjadikan perpustakaan sebagai sarana mendapatkan informasi. Ketika manusia mencari informasi atau ilmu pengetahuan dalam rekam jejak digital maka fungsi perpustakaan telah berjalan. Pemustaka memperoleh informasi, pengetahuan dan ilmu pengetahuan secara on line memang diperlukan integrasi dan simplikasi agar pemustaka mendapatkannya dengan kualitas dan kuantitas yang valid akuntabel dan sesuai kebutuhan dari pemustaka itu sendiri. Sumber pengetahuan atau bacaan tetap dibutuhkan baik perpustakaan konvensional tatap muka dengan pelayanan pustakawan maupun dengan media on line, web atau link perpustakaan on line. Hibridisasi keduanya tetap diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan karakter pemustaka yang bersangkutan.

Kata Kunci: Layanan perpustakaan; ilmu pengetahuan; aksesibilitas informasi**ABSTRACT**

The existence of a library is essential in maintaining consistent implementation of policies in the education sector. Libraries as facilities and infrastructure for serving literature needs and learning processes to support the nation's intelligent life process. In the current era of digitalization, as a form of progress in information and technology, it has made it easy for readers to search for knowledge quickly. The need for reading sources and literature can be obtained in an instant without leaving the place at the same time. With the easy accessibility of information, data, recordings or perhaps books created by humans digitally, libraries are increasingly becoming a means of obtaining information. When people search for information or knowledge in digital records, the library function is running. Users who obtain information, knowledge and knowledge online require integration and simplification so that users get it with quality and quantity that is valid, accountable and according to the needs of the users themselves. Sources of knowledge or reading are still needed, whether in face-to-face conventional libraries with librarian services or with online media, the web or online library links. Hybridization of the two is still necessary according to the needs and character of the user concerned.

Keywords: library services; Science; information accessibility

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia,” Memajukan kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan bangsa”, Pemerintah Negara Kesatuan RI, sejak awal kemerdekaan telah menetapkan sejumlah kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Kebijakan dimaksud meliputi, kebijakan bidang pendidikan mulai tingkat formal PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Atas serta perguruan tinggi, pendidikan non formal maupun pendidikan informal. Termasuk terbangunnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan. Saat ini telah berdiri sekolah dan lembaga pendidikan di seluruh pelosok nusantara, yang bahkan telah memberikan kontribusi besar dalam pencapaian Indeks pembangunan manusia, sebagai salah satu indikator di dalamnya pendidikan, untuk mengukur rasio kesuksesan suatu bangsa di bidang pembangunan manusia, selain pembangunan ekonomi dan derajat kesehatan.

Untuk menjaga konsistensi implementasi kebijakan di bidang pendidikan tersebut, salah satu syarat esensial yang sangat mendukung adalah keberadaan perpustakaan. Perpustakaan sebagai sarana dan prasarana pelayanan kebutuhan literature dan proses pembelajaran untuk mendukung proses pencerdasan kehidupan bangsa dimaksud. Perpustakaan kemudian berkembang sebagai tempat pemustaka mendapat ilmu, berdiskusi dan menemukan jawaban- jawaban akademik dri pertanyaan yang ada di benak pemustaka (Eskha, 2018). Demikian pula di perguruan tinggi, termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri, telah mengembangkan perpustakaan baik secara fisik ruangan maupun koleksi buku-buku, sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian masyarakat. Perpustakaan sesuai dengan eksistensinya ramai dikunjungi

pemustaka atau praja (istilah di IPDN untuk mahasiswa).

Namun demikian seiring waktu, apalagi di Era digitalisasi saat ini, sebagai wujud kemajuan informasi dan teknologi, telah memberikan kemudahan bagi siswa, mahasiswa, praja sebagai pencari ilmu pengetahuan secara cepat. Kebutuhan akan sumber bacaan dan literatur dapat diperoleh dalam waktu sekejap tanpa meninggalkan tempat di ruang waktu yang sama.

Fenomena yang serba cepat tersebut, seolah-olah telah menapikan keberadaan perpustakaan konvensional resmi yang telah diadakan di tiap lembaga pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran, bahkan ada yang berpendapat dengan kondisi tersebut apakah perpustakaan konvensional mendatangi ruang baca yang sudah nyaman, sejuk dan menyenangkan, di tiap lembaga pendidikan masih diperlukan? Tulisan ini akan mencoba menganalisis dengan pendekatan teoritik dan normative, mengenai eksistensi perpustakaan

TINJAUAN TEORITIK DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan baik berupa buku-buku maupun non buku (*non book material*) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya (Ibrahim, 2009). Buku-buku yang tersedia dan dimaksudkan untuk dibaca, sehingga perpustakaan merupakan tempat untuk menambah ilmu pengetahuan, mendapatkan keterangan atau tempat mencari hiburan. Perpustakaan adalah sebuah gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitanan lainnya, menurut tata susunan tertentu untuk dibaca, bukan untuk dijual. Dalam pengetahuan buku dan terbitan lainnya,

termasuk di dalamnya semua bahan cetak, buku, majalah, laporan, pamphlet, prosiding, manuskrip, lembaran music berbagai karya music, berbagai karya media audio visual seperti film, slide, kaset, piringan hitam, bentuk mikro seperti microfilm, mikrofilm, (Sulistiyo Basuki, 1991).

Perpustakaan dalam referensi perpustakaan nasional, adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruang tempat khusus, koleksi bahan pustaka dari berbagai disiplin ilmu, untuk menambah ilmu pengetahuan, di dalamnya terdapat pengembangan koleksi, layanan pengguna, pemeliharaan sarana/prasarana yang dikelola dengan sistem dengan melibatkan sumber daya manusia yang profesional. Perpustakaan merupakan tempat dimana koleksi buku dan terbitan disusun sedemikian rupa menurut sistem tertentu sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan cepat pada saat dibutuhkan. Perpustakaan gudang penyimpanan ilmu pengetahuan secara simultan, sistematis dan terpelihara fungsi dan kemanfaatannya. Perpustakaan adalah gudang pengetahuan, sumber informasi penting yang dapat mengungkapkan sejarah masa lalu, berfungsi sebagai dasar perencanaan dan penelitian di masa depan, yang berada di mana-mana, dengan jenis, ukuran, kualitas yang berbeda.

Dalam bahasa Indonesia, perpustakaan artinya kitab, buku. Dalam bahasa Inggris, disebut *library*, yang berasal dari kata *liber*, *libri* yang artinya buku. Kemudian dari kata lain tersebut terbentuklah kata *librarius*, *bibliotheca* (Belanda), *bibliothek* (Jerman). Dari beberapa pengertian tentang perpustakaan dari para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perpustakaan adalah tempat dimana buku, bahan terbitan atau sejenisnya tersimpan dengan metode tertentu, yang menjamin kemudahan dan percepatan penemuan apabila diperlukan dan penyimpanan kembali secara profesional.

Adapun makna perpustakaan secara normatif diatur pada Undang-Undang Nomor 43

tahun 2007 tentang Perpustakaan, ditegaskan dalam pertimbangan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 43 tahun 2007 secara tegas dijelaskan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam jejak secara profesional dengan sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka (pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan). Diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dengan tujuan, memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, secara limitatif ditegaskan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya perpustakaan sesuai tujuan keberadaannya. Pasal 7 ayat (1), untuk Perpustakaan Pemerintah berkewajiban mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional, menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, menjamin ketersediaan

layanan perpustakaan secara merata di tanah air, menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi) dan alih media (transmedia), menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan, membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, mengembangkan perpustakaan nasional serta memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno.

Adapun kewajiban Pemerintah Daerah (pasal 8), adalah, menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat, menggalakkan promosi gemar membaca dengan menfaatkan perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah serta menyelenggarakan dan meembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan secara berkualitas ditetapkan standar nasional perpustakaan (pasal 11), yang meliputi, standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Dengan obyek kepemilikan perpustakaan, yang terdiri atas, perpustakaan pemerintah, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabuoaten/kota, perpustakaan kecamatan, perputakaan desa, perpustakaan masyarakat, perpustakaan keluarga dan perpustakaan pribadi. Dengan kualifikasi jenis perpustakaan (pasal 20), perpustakaan nasional, perpustakaan umum,

perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus (menyediakan bahan perpusstakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya, dan memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas pelayanan kepada pemustaka di luar lingkungannya).

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Peradaban dan budaya sebagai hasil karya manusia, yang awal untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masanya, terdapat kecendrungan untuk dilihat kembali pada saat diperlukan dan untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Untuk menjaga secara konsisten dan berkelanjutan hasil pemikiran, karya dan cipta manusia tersebut, peran perpustakaan menjadi penting (Wulandari, 2011).

Perpustakaan sebagai tempat, sebagai mekanisme, sebagai sistem dan sebagai fasilitasi, eksistensinya sangat diperlukan, tidak dalam upaya mewujudkan perncerdasan kehidupan bangsa dan peningkatan deraja pendidikan serta pengetahuan masyarakat. Perpustakaan sebagai sebagai sumber informasi pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta hasil karya manusia baik berupa buku, ukiran, lukisan atau audio yang tersedia dan pelayanan kepada pemustaka secara komprehensif dan professional.

Para ahli semua berkesimpulan bahwa perpustakaan demikian memiliki nilai strategis dalam proses pendidikan bangsa, pencerdasan kehidupan masyarakat serta menapak masa depan serta refleksi pemaparan peradaban masa lalu sebagai sumber inspirasi untuk pencapaian tujuan nasional sebagai dalam Pembukaan UUD 1945. Perpustakaan, sebagai sistem pengeloan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai peran utama melestarikan hasil budaya umat manusia, menyampaikan gagasan, pemikiran, pengetahuan umat manusia kepada generasi berikutnya.

Demikian pula secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa perpustakaan merupakan sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, dan berfungsi melestarikan hasil karya manusia sebagai warisan yang tidak ternilai harganya. Dengan demikian perpustakaan yang keberadaannya dalam era digitalisasi dan globalisasi seperti saat ini justru menjadi penguat eksistensi perpustakaan. Dengan kemudahan aksesibilitas informasi, data, rekaman atau mungkin buku hasil karya manusia secara digital makin menjadikan perpustakaan sebagai sarana mendapatkan informasi (Endarti, 2022). Disadari atau tidak disadari, ketika manusia mencari informasi atau ilmu pengetahuan dalam rekam jejak digital maka fungsi perpustakaan telah berjalan.

Namun memang disadari bahwa agar jejak digital informasi yang diperoleh bukan dari sumber yang representatif yang dijamin akuntabilitasnya menjadi tantangan bagi pengelola dimaksud, agar informasi yang diperoleh valid, sesuai kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi unsur edukasi serta kecerdasan kehidupan bangsa.

Perpustakaan yang telah berkembang saat ini baik secara konvensional berupa buku, majalah, bulletin dan lain-lain di ruang fisik perpustakaan maupun secara online digitalisasi, merupakan suatu kondisi *sine qua non*, sesuatu yang harus tampak seperti itu, dengan tetap fungsi edukasi dan informasi pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Keberadaan perpustakaan online makin member akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam proses kecerdasan kehidupan bangsa, di mana kebutuhan akan bahan bacaan sangat diperlukan, baik di perpustakaan konvensional secara fisik di ruang tertentu maupun melalui jaringan atau media elektronik atau audio. Keduanya dibutuhkan secara hybrid dan saling melengkapi keuntungan kelemahan

masing-masing (Allen, 2005). Perpustakaan konvensional ruangan fisik, memiliki keunggulan temu langsung pemustaka dengan pelayanan pustakawan, lebih bebas memilih literatur atau bahan bacaan tanpa terpengaruh ruang dan waktu (Shiri, 2003; Saleh, 2014; Nurhayati, 2018). Menurut Subrata (2009) perpustakaan atau sumber bacaan dari media online atau perpustakaan online, jaringan atau prasarana digital, untuk akurasi konsentrasi diperlukan validitas dan keajegan jaringan, dan kemandirian pemustaka dalam mendapatkan bahan bacaan yang diperlukan dan kapabilitas pemustaka dalam membuka dan mengakses web atau link perpustakaan online tersebut, serta kehati-hatian dalam mengakses sumber yang benar-benar akuntabel dapat dipercaya kelayakan dan representatifnya.

KESIMPULAN

Perpustakaan sebagai tempat mendapatkan informasi, pengetahuan dan ilmu pengetahuan, telah berkembang tidak saja dari ruang fisik pelayanan buku dan sejenisnya akan tetapi juga secara online digital. Kondisi tersebut makin menguatkan akselerasi perwujudan fungsi perpustakaan dalam proses pendidikan dan kecerdasan kehidupan bangsa. Namun demikian agar pemustaka memperoleh informasi, pengetahuan dan ilmu pengetahuan secara online memang diperlukan integrasi dan simplifikasi agar pemustaka mendapatkannya dengan kualitas dan kuantitas yang valid akuntabel dan sesuai kebutuhan dari pemustaka itu sendiri. Sumber pengetahuan atau bacaan tetap dibutuhkan baik perpustakaan konvensional tatap muka dengan pelayanan pustakawan maupun dapat juga dengan media *online*, *web* atau *link* perpustakaan *online*. Hibridisasi keduanya tetap diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan karakter pemustaka yang bersangkutan.

Jalinan, jaringan dan net working antar perpustakaan terutama secara online

line merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari, bahkan sangat diperlukan agar semakin memudahkan pemustaka mengakses informasi sesuai kebutuhan pemustaka itu sendiri tanpa terhambat masalah jaringan, akses dan hambatan teknis lainnya, seperti sumber daya pengelola, keberlanjutan, teknologi dan dukungan anggaran. Sebab apabila pada saatnya nanti, atau mungkin saat ini telah lebih banyak aksesibilitas pengunjung perpustakaan secara online lebih banyak dari pengunjung perpustakaan konvensional, keterbatasan atau kendala teknis jaringan secara merata di seluruh pelosok Negara RI, sebagai mana fungsi perpustakaan itu seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Mewujudkan perpustakaan sebagai sarana informasi peradaban dan hasil karya manusia di masa lalu secara merata, dan memberikan implikasi pada akselerasi pencerdasan kehidupan bangsa secara komprehensif menyeluruh. Perwujudan harapan tersebut menjadi tugas kita semua, sebagai anak bangsa yang semua bertekad pada pencapaian tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui kunjungan ke perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, L. (2005), Hybrid librarians in the 21st century library: a collaborative service staffing model. In ACRL Twelfth National Conference, Minneapolis, Minnesota.
- Basuki, Sulistyono, (1991), *Ilmu Perpustakaan*, Gramedia, Jakarta
- Bafadal, Ibrahim, (2019), *Pengelolaan Perpustakaan*, Bumi Aksara, Bandung.
- Eskha, Ahmad. (2018). *Peran Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar*. Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan. 2(1), 12-18. <https://doi.org/10.15548/jib.v2i1.25>
- Endarti, S. (2022). *Perpustakaan sebagai Tempat Rekreasi Informasi*. Abdi Pustaka. Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan. 2(1): 23-28.
- Lasa, Hl, (2017), *Manajemen Perpustakaan*, Primus, Yogyakarta
- Nurhayati, A, (2018), *Perkembangan Perpustakaan dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat*. Jurnal Perpustakaan, 9(1): 21-32.
- Saleh, A. R. (2014). *Pengembangan Perpustakaan Digital*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Shiri, A. (2003). Digital library research: current developments and trends. *Library Review*, 52(5), 198-202. doi:10.1108/00242530310476689
- Subrata, G., & Kom, S. (2009). *Perpustakaan Digital*. Artikel Pustakawan Universitas Negeri Malang.
- Wulandari, D. (2011). *Mengembangkan Perpustakaan Sejalan dengan Kebutuhan Net Generation*. *Visi Pustaka*, 13(2), 16-24. http://repository.petra.ac.id/15260/1/net_generation1.pdf
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan